

12-11-2021

Peran dan Kepentingan North Atlantic Treaty Organization (NATO) Dalam Konflik Perang Sipil di Libya: Studi Kasus Periode Tahun 2011-2015

Harisuda Murdani

Universitas Indonesia, harisudamurdani@gmail.com

Yon Machmudi

Universitas Indonesia, yonmachmudi01@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis>



Part of the [International Law Commons](#), [International Relations Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Near and Middle Eastern Studies Commons](#), and the [Political Theory Commons](#)

Recommended Citation

Murdani, Harisuda and Machmudi, Yon (2021) "Peran dan Kepentingan North Atlantic Treaty Organization (NATO) Dalam Konflik Perang Sipil di Libya: Studi Kasus Periode Tahun 2011-2015," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*: Vol. 8: No. 2, Article 1.

DOI: 10.7454/meis.v8i2.134

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/meis/vol8/iss2/1>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Middle East and Islamic Studies* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERAN DAN KEPENTINGAN *NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION* (NATO) DALAM KONFLIK PERANG SIPIL DI LIBYA: STUDI KASUS PERIODE TAHUN 2011-2015

Harisuda Murdani dan Yon Machmudi

Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia

Email: *harisudamurdani@gmail.com*, *yonmachmudi01@gmail.com*

Abstract

The wave of the Arab Spring in the East The Civil War in Libya that occurred in the Middle East in 2011 was felt in Libya. The conflict that started as a demonstration ended in a civil war between the government and the Libyan opposition. NATO's humanitarian intervention is the mandate of the United Nations in the civil war in Libya uses the Responsibility to Protect rule to prevent the conflict from spreading. The presence of NATO as an international community is not only due to concern for Libya but there is an interest of oil resources in Libya. During 2011-2015, NATO did not have a significant impact on the continuation of Libya after the civil war. The case problems that occurred were discussed using descriptive qualitative methods with a literature study using analysis of conflict resolution theory and the oil economy as the initial conflict trigger. The author finds that oil has the potential to make other countries involved in domestic conflicts. NATO needs to be a continuation of the oil supply in Libya. Regional and international actors determine Libya's complicated future with local factions who fighting for power.

Keywords: NATO, The Civil War, Intervention, Economic Oil

PENDAHULUAN

Fenomena *Arab Spring* yang terjadi pada tahun 2011 adalah serangkaian dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah yang menuntut perubahan sistem politik negara-negara yang umumnya menganut sistem monarki atau kerajaan ke arah demokrasi sebagaimana yang di proklamirkan oleh negara-negara Barat. Kejadian bermula bermula di Tunisia pada akhir tahun 2010, saat seorang pedagang yang notabene seorang sarjana melakukan bunuh diri karena kecewa aspirasi dan

keluhannya tidak di dengar pemerintah Tunisia (Stephan & Linz, 2013). *Arab Spring* seolah jadi pemantik dari kumulasi kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa, tidak terkecuali di Libya saat rakyat menuntut revolusi dari rezim Presiden Muammar Qaddafi yang sudah berkuasa lebih dari empat dekade.

Aksi unjuk rasa dari rakyat yang anti-pemerintah yang menuntut kemerdekaan, kebebasan politik dan kesejahteraan menuntut perubahan berujung pada tragedi perang sipil antara

pemerintah-rakyat yang berakibat jatuhnya korban jiwa dari kedua pihak yang punya kepentingan kontradiktif (Yasmine, 2015). Qaddafi memimpin Libya selama empat dekade dengan modal sumber daya minyak yang merupakan nomor 3 terbesar di Afrika. Sumber daya minyak Libya yang melimpah menjadi sumber pendapatan utama negara mencapai 90% (Rahmawati, 2012). Qaddafi mampu memberikan subsidi bagi rakyat Libya di bidang ekonomi, pendidikan dan tempat tinggal dua pada periode awal kepemimpinannya. Rakyat menikmati hasil dari program ekonomi minyak yang dikelola pemerintah. Pada saat itu pertumbuhan PDB Libya adalah yang tertinggi di dunia dan rakyat bebas dari biaya pendidikan dan rumah disediakan pemerintah (Bagaskara, 2019).

Persatuan Arab adalah cita-cita Qaddafi yang ingin menyatukan negara-negara di tanah Arab khususnya Afrika. Kekuatan ekonomi minyak digunakan Qaddafi terlibat konfrontasi dalam kancah politik internasional guna menentang sistem internasional dinilai tidak adil bagi negara-negara berkembang. Qaddafi ingin profit produksi dan hasil minyak diberikan untuk rakyat serta pertumbuhan ekonomi Libya. Hal ini bertentangan dengan kepentingan ekonomi perusahaan minyak dari negara-negara besar dengan naiknya

pajak dan biaya produksi. Desakan dari pihak asing karena ide-ide politiknya yang berani dan radikal berujung dilemahkan legitimasinya dari dalam negeri, tentunya tidak disukai oleh negara-negara yang punya kepentingan ekonomi dan politik di Libya secara khusus negara-negara anggota NATO (Indrawan, 2013).

Pemikiran politik Qaddafi terinspirasi dari tokoh idolanya Gamal Abdul Nasser, mantan Presiden Mesir. Politik luar negeri Libya era Qaddafi berjalan tidak harmonis dengan dunia internasional, khususnya negara-negara Barat yang tergabung dalam aliansi NATO. Amerika Serikat sebagai negara pemimpin NATO terlibat konfrontasi langsung dan tidak langsung dengan Libya. Pada tahun 1970 klaim atas wilayah utara Libya yang letaknya 300 mil dari negara. Qaddafi menyatakan lokasi itu adalah wilayah Libya dan batasnya adalah kematian dan AS menolaknya hingga berujung pada konfrontasi (Colgan, 2013). Tahun 1981 pesawat Sukhoi Libya ditembak jatuh oleh AS dan pada tahun 1986 AS menyerang Tripoli yang menewaskan putri Qaddafi.

Politik Qaddafi yang revolusioner dan kebijakan ekonomi minyak adalah potensi utama Libya terlibat dalam konflik regional dan internasional. Pada bidang

politik internasional, sosok revolusioner pangkalan militer AS dan Inggris di wilayah Libya. Qaddafi memberi negara Barat dan upaya nasionalisasi perusahaan minyak dan *Pan Arabisme* atau Persatuan Arab. Tingkat regional, Libya terlibat dalam proksi perang sipil di Chad. Libya ingin Chad bersatu oleh karena itu Libya mendukung Goukouni dan berhasil menjadi presiden tahun 1979. Pada tahun 1981 lawan politik Goukouni yang didukung Prancis Hissene Habre menang, Libya kalah dalam proksi dengan Prancis.

Perang sipil membawa Libya pada babak baru situasi negara yang ingin tumbuhnya demokrasi dan kemerdekaan bagi rakyatnya. NATO diberi mandat dari PBB yang disahkan dalam Resolusi DK PBB 1970 dan Resolusi 1973 sebagaimana konsep *Responsibility to Protect* (R2P) bertanggung jawab untuk mencegah, tanggung jawab untuk bereaksi dan tanggung jawab untuk membangun kembali negara selama dan pasca perang sipil antara rezim Qaddafi melawan rakyat oposisi yang kemudian menjadi wadah bagi *National Transitional Council* (NTC) (Krisetya, 2016). Implementasi dari R2P NATO secara nyata justru menimbulkan kerugian bagi Libya karena Libya mengalami kerusakan infrastruktur dan masyarakat menjadi korban. Kilang-kilang minyak menjadi sasaran faksi-faksi dan

dengan gagasan awal memindahkan perubahann tatanan politik internasional Libya dengan kelompok radikal di Libya yang berebut mendapatkan kekuasaan (Pedersen, 2013).

Pada implementasi di lapangan konsep R2P tidak terukur dan direncanakan dengan cermat karena menggunakan kekuatan militer dengan skala besar dan menyasar rakyat sipil alih-alih menumpas Qaddafi dan aktor politik yang mendukungnya. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Italia di bawah panji NATO terus berusaha akan membentuk Libya dengan sekuritisasi sumber daya dan sikap politik. Sistem internasional mengalami perubahan dari era kekaisaran, sistem negara dan munculnya aktor negara serta non-negara. Secara dramatis Libya tetap menjadi tantangan untuk dunia. NATO berusaha membuat sistem tapi gagal, IMF-*World Bank* masuk dalam konflik tetapi juga gagal membangun, AS mengusir ISIS dengan invasi militer. Komunitas internasional percaya bahwa Libya dapat diubah untuk tujuan mereka tanpa adanya norma dan standar negara dan kedaulatan yang jelas. (Anderson, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan metode studi kasus untuk memahami dan mendalami peristiwa sejarah (Creswell, 2013). Sumber data menggunakan data sekunder atau studi pustaka berupa artikel dari jurnal ilmiah, transkrip, buku-buku, skripsi dan tesis berkaitan dengan topik penelitian yang serupa. Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan rujukan dalam pendalaman dan pemecahan masalah (*problem solving*) penelitian (Rahardjo, 2017). Data yang sudah ada kemudian dilakukan analisa untuk melihat hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya. Proses analisa data dilanjutkan dengan reduksi data untuk memilih data yang relevan sebagai bagian proses interpretasi data. Pada bagian akhir peneliti membuat kesimpulan hasil penelitian berdasarkan data yang valid (Ajat Sudrajat, 2014).

Kerangka Teori

Berdasarkan analisa dan argumentasi pada data yang sudah ditemukan. Penelitian ini membahas bahwa keterlibatan NATO di Libya bukan karena faktor tanggung jawab sebagai aliansi atau komunitas internasional untuk mencegah konflik internal meluas ke arah internasional. Analisa keterikatan aliansi NATO terhadap sumber daya minyak di

Libya perlu dibahas dalam artikel ini faktanya NATO memiliki ketergantungan pada minyak Libya yang menempati urutan ke tujuh negara dengan cadangan minyak dan posisi tujuh belas negara produsen minyak (Opec Annual Statistical Report, 2004). Selain itu kepemimpinan Qaddafi yang revolusioner dan radikal berpengaruh pada *national interest* negara-negara NATO. Qaddafi dianggap *unfriendly* bagi mereka dengan mempersulit kerjasama ekonomi, selain itu optimalisasi militer Libya dan program senjata nuklir sebagaimana pandangan AS dianggap sebagai ancaman stabilitas keamanan regional dan internasional.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena pada penelitian ini fokus membahas keterlibatan aliansi NATO pada dinamika politik di Libya periode tahun 2011-2015. Pertama bagaimana proses terlibatnya aliansi NATO dalam konflik perang sipil di Libya saat terjadinya Arab Spring 2011 di bawah rezim Muammar Qaddafi menuju demokrasi di Libya. Kedua, mengapa negara-negara anggota NATO aktif terlibat serta memiliki peran dan kepentingan dalam dinamika politik di Libya pasca konflik perang sipil tahun 2011-2015.

Dalam penelitian ini penulis berusaha mendalami dua faktor utama aliansi NATO yang diwakili oleh AS, Inggris, Prancis, Italia dan Turki punya

peran dan kepentingan dalam dinamika politik di Libya periode tahun 2011-2015 yakni kepentingan politik dan sumber daya ekonomi minyak.

Menurut teori *economic oil* (Colgan, 2013) adalah dua faktor dependen yang umumnya terjadi pada negara *petrostates* di Timur Tengah. Ekonomi adalah faktor meningkatnya frekuensi perang saudara atau hingga skala besar konflik bersenjata dalam negeri. Minyak sebagai pemantik perang saudara yang dapat dilakukan dan pemberontak di negara tersebut. Para pemimpin akhirnya menciptakan keputusan tidak populer menciptakan pondasi politiknya untuk mempertahankan kekuasaan.

Colgan (2013) mengatakan pendapatan minyak yang kuat digunakan untuk kebijakan luar negeri yang agresif dan kontradiktif dengan kesepakatan internasional yang bermuara pada konflik internasional. Pemimpin cenderung memiliki kekayaan independen karena sumber minyak yang dikelola oleh negara, sehingga dari minyak menciptakan sumber kekuatan politik. Minyak sebagai instrumen yang digunakan oleh pemimpin untuk membuat kebijakan yang lebih besar daripada rata-rata pemimpin negara *non-petrostate* karena kemampuannya yang lebih besar untuk mendistribusikan kembali pendapatan untuk membeli dukungan politik. Otonomi politik

dengan dalam tiga cara. Pertama, penyediaan keuangan bagi pihak-pihak yang bertikai terutama pemberontak atau separatis. Kedua, meningkatkan nilai finansial tujuan kemenangan dalam perang saudara dengan demikian bangkitnya motivasi untuk berperang. Ketiga, dengan mendorong korupsi dan melemahkan institusi negara. Minyak membuat negara dan pemimpinnya relatif tidak transparan dalam bidang ekonomi dan politik sehingga memicu ketidakpuasan oposisi memungkinkan pemimpin untuk mengambil keputusan yang berbeda dari preferensi pendukung domestik. Hal ini membuat pemimpin *petrostate* menghadapi risiko yang lebih kecil untuk diberhentikan dari jabatannya atau dihukum karena pilihan kebijakan luar negeri yang tidak populer.

Teori revolusi dalam hubungan internasional menurut Colgan (2013) adalah suatu negara yang bertujuan melakukan revolusi antara lain dalam bidang politik, sosial dan ekonomidari *status quo* yang berpotensi memicu konflik karena dapat memberi ancaman bagi perdamaian internasional. Argumentasi teoritis Colgan adalah negara yang melakukan revolusi domestik dalam beberapa bidang baik bidang seperti politik, sosial dan ekonomi dapat menimbulkan konflik pada suatu negara yang secara luas berdampak pada situasi

internasional. Revolusi biasanya dilakukan dengan cara kekerasan, aksi kudeta, pemberontakan dan senjata yang dilakukan terhadap otoritas negara. Sebuah negara yang melakukan revolusi umumnya memiliki pemimpin yang revolusioner dengan preferensi untuk agresi demi menciptakan pragmatisme negara dan tujuan politik dari pemimpinya.

Pemimpin yang berperilaku revolusioner adalah pemimpin yang membuat perubahan dalam beberapa hal seperti politik, sosial dan ekonomi dari status quo negara. Pemimpin revolusioner biasanya mempunyai sikap terbuka terhadap resiko konflik, artinya negara yang dipimpinya siap terlibat dalam isu atau konflik internasional. Pemimpin revolusioner tidak takut dalam mengambil tindakan yang beresiko cedera dan kematian untuk mewujudkan ambisinya. Dengan resiko dan keberanian tersebut, biasanya pemimpin revolusioner tidak segan berkonfrontasi dalam urusan hubungan internasional. Ada dua faktor dependen dari sikap pemimpin revolusioner, pertama situasi internasional yang mempengaruhi kondisi domestik negaranya atau yang kedua dalam kebijakan domestik pemimpin revolusioner akan dilanjutkan dalam tujuannya dalam agresi politik internasional.

Revolusi dilakukan perlu kekuatan antara lain kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Hal tersebut dapat terwujud bila suatu negara mempunyai sumber ekonomi yang memadai dan masif sebagai sumber kekuatan. Faktor ekonomi dan revolusi adalah dua variabel utama dalam proses revolusi yang nantinya berpengaruh terhadap kebijakan hubungan internasional suatu negara.

Jenderal George Casey dalam konsep perang modern (Ivanov, 2011) bahwa perang modern dilakukan untuk mengatasi berbagai macam operasi termasuk perang gerilya dan pemberontakan. Perang seperti ini tidak hanya melucuti kekuatan militer pada satu medan perang saja, tetapi mengalahkan kekuatan politik dan dilakukan dalam jangka waktu bertahun-tahun. Transformasi organisasi NATO melihat perubahan zaman berusaha menyesuaikan untuk mengatasi perang asimetris. Perang asimetris dilakukan oleh kekuatan yang berbeda dimana kekuatan yang lebih kecil meyakini dirinya tidak mampu mengalahkan lawan dengan kekuatan militer hingga akhirnya menggunakan strategi ideologi dan politik untuk mengalahkan lawannya. Pasca perang dingin negara-negara Barat meyakini bergabung dalam sebuah aliansi adalah pilihan strategis untuk mengatasi isu-isu keamanan internasional kontemporer ini.

Aliansi menurut Ivanov (2011) adalah kelompok formal negara-negara untuk menggunakan atau tidak menggunakan kekuatan militer melawan negara-negara di luar keanggotaan mereka sendiri dalam keadaan tertentu. Berpedoman pada asosiasi yang tujuan pertama dengan tujuan militer atau keamanan yang melibatkan setidaknya beberapa negara perlu kesepakatan formal antara para anggota aliansi. Kedua, aliansi berbeda dari keberpihakan, yang hanya didasarkan pada kepentingan bersama dan komitmen informal. Ketiga, dibentuk sebagai reaksi melawan negara-negara lain di luar anggota aliansi mereka menangani masalah keamanan internasional, dan dengan demikian mengecualikan segala bentuk interaksi internasional lainnya. Aliansi adalah bentuk kerja sama antar negara yang didefinisikan secara relatif kecil dan eksplisit.

Aliansi internasional adalah kerjasama antar pemerintah negara yang melibatkan proses diplomasi dengan tawar menawar pengaruh mitra yang berbeda dalam perpektif politik yakni kepentingan, kekuasaan dan komitmen. Proses perundingan atau tawar menawar dalam sebuah aliansi adalah wajar untuk mendapat keuntungan berdasarkan nilai tawar yang dimiliki. Dalam konteks NATO sebagai aliansi militer Eropa

seperti kontribusi kesiapsiagaan militer, operasi militer bersama, pembagian tanggung jawab dan strategi bersama mengatasi atau terlibat dalam operasi perang. Ada tiga aspek umum bagaimana sebuah negara bergabung dalam aliansi yaitu minat, kekuatan dan komitmen. Garis besarnya dengan bergabung dalam sebuah aliansi dapat mengakomodir kepentingan negara dengan jembatan aliansi. Aliansi memungkinkan negara mengurangi insentif yang besar dalam mewujudkan kepentingan politik dan ekonomi. Sebuah negara kecil merasa terlindungi dengan tergabung dalam aliansi internasional yang kuat dan punya kekuatan militer yang tanggung karena masing-masing negara punya tanggung jawab melindungi negara lain anggota aliansi.

HASIL PEMBAHASAN

Implikasi Terlibatnya NATO di Libya

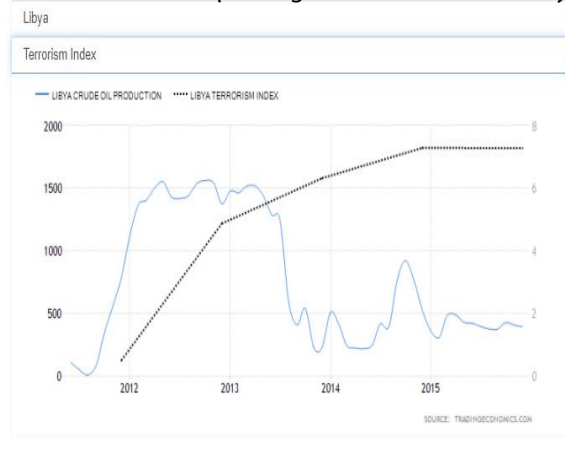
Keterlibatan aliansi NATO dan negara-negara Barat untuk mewujudkan perubahan dan mendukung kekuasaan pemerintahan transisi diwakili oleh NTC. Intervensi asing dan andil dalam pemerintahan transisi sebagai tanda lemahnya legitimasi pemerintah, penting mendapat dukungan politik untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai boneka atau tangan kanan Barat khususnya anggota NATO. Bantuan yang diberikan memberi stigma bahwa Barat mempunyai hak di Libya membuat rekomendasi

tertentu di pemerintahan transisi dalam beberapa kebijakan ekonomi khususnya sumber daya minyak di Libya (Pedersen, 2013). Indikator ini berpotensi menyebabkan instabilisasi pemerintahan karena minimnya andil pribumi dalam pemerintah transisi yang justru penentu keberhasilan *long term*, baik dari keadilan transisional maupun membuat perspektif resolusi konflik.

Intervensi kemanusiaan yang berujung pada operasi militer dengan komando dari AS, Inggris dan Prancis ini tidak dapat dilepaskan dari motif sumber daya minyak dan politik. Hal serupa saat intervensi pimpinan AS dan sekutu di Afghanistan dan Irak awal tahun 2000-an membasmi teroris atau mencari minyak. Tujuan untuk mengambil alih cadangan minyak negara itu, dengan membuat instabilisasi perusahaan minyak nasional atau *National Oil Cooperation* (NOC) (Indrawan, 2013). Tujuan utamanya untuk melakukan kontrol industri minyak dengan alih kendali dan kepemilikan kekayaan minyak Libya kepada tangan-tangan asing (Global Research, 2011). Barash dan Webel (2009) mengatakan dalam tulisannya bahwa minyak adalah sumber kekuasaan yang memiliki efek luar biasa dan juga sangat kompleks di era globalisasi ekonomi ini.

Pada tahun 2013 atau tiga tahun pasca revolusi tahun 2011 Libya jatuh dalam perang saudara kedua dengan melibatkan empat pihak besar yang berkonflik berebut kendali pemerintah: Pemerintah di Tobruk, Koalisi Fajar Libya, Revolusioner Benghazi, dan ISIS. Pada tahun 2013 produksi minyak di Libya turun dari sekitar 1,5 juta barel per hari, atau kira-kira 2% dari kebutuhan pasar global, menjadi kurang dari 300.000 barel per hari. Faksi yang bertikai merebut produksi minyak, melakukan jual beli ilegal dan membuat perusahaan minyak sendiri untuk menjual minyak mentah dari ladang minyak dan terminal pelabuhan yang mereka kuasai. Upaya ini bagian perlawanan kepada pemerintah pusat Libya yang goyah atas produksi minyak.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia mentaksir PDB riil turun 5-6% selama 2013. Kondisi ekonomi lebih buruk daripada tahun 2011 membuat pemerintah merespons menekan pengeluaran menggunakan devisa internasional di Bank Sentral Libya (CBL) pada akhir 2012 mencapai \$120 miliar dan aset asing dari Otoritas Investasi Libya (LIA). Mekanisme ini tidak memungkinkan karena PBB membekukan aset asing Libya.



Gambar 3.1 Indeks Perbandingan Produksi Minyak Mentah Dengan Aktifitas Terorisme Pada Tahun 2011-2015
 Sumber: <https://id.tradingeconomics.com/libya/crude-oil-production>

Data di atas adalah gambaran bahwa stabilitas politik Libya belum kondusif meskipun produksi minyak yang kian meningkat pasca tahun 2011. Peningkatan produksi minyak tentunya meningkatkan GDP negara. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Libya belum sejahtera karena salah satu penyebab aksi terorisme adalah gagalnya pemerintah memberikan perhatian salah satunya adalah di bidang

kesejahteraan ekonomi. Pada tabel 3.1, menunjukkan bahwa pengungsi atau korban perang sipil jumlahnya dalam kategori yang tinggi. Pada periode tahun 2011-2015 jumlah pengungsi atau rakyat yang terdampak konflik selalu meningkat. Peningkatan ekonomi GDP hanya dirasakan oleh aktor atau kelompok yang berebut kekuasaan di Libya.

	2007	2008	2009	2010	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	2011	11/10	Average change
Algeria	1,358	1,377	1,268	1,250	1,246	1,244	1,241	1,230	1,240	-10	
Angola	1,660	1,871	1,780	1,783	1,665	1,548	1,675	1,763	1,663	-120	
Ecuador	507	503	477	475	490	490	486	494	490	15	
IR Iran	3,855	3,892	3,725	3,706	3,656	3,658	3,607	3,563	3,621	-85	
Iraq	2,089	2,341	2,422	2,401	2,652	2,665	2,682	2,669	2,667	266	
Kuwait	2,464	2,554	2,263	2,297	2,374	2,483	2,597	2,690	2,537	240	
Libya	1,710	1,718	1,557	1,559	1,096	153	47	562	462	-1,098	
Nigeria	2,125	1,947	1,812	2,061	2,087	2,144	2,183	2,026	2,110	49	
Qatar	807	839	781	801	807	807	808	810	808	7	
Saudi Arabia	8,654	9,113	8,051	8,271	8,707	9,081	9,629	9,653	9,271	1,000	
UAE	2,504	2,557	2,256	2,304	2,441	2,519	2,551	2,557	2,517	213	
Venezuela	2,495	2,557	2,394	2,338	2,383	2,375	2,391	2,371	2,380	42	
Total OPEC	30,228	31,270	28,785	29,246	29,606	29,165	29,897	30,387	29,766	520	

Tabel 3.2 Produksi Minyak Mentah Libya Tahun 2007-2011
 Sumber: OPEC Annual Report 2011

Pada periode tahun 2007-2010 produksi minyak Libya relatif stabil di angka rata-rata 1,4 juta barel per hari. OPEC mencatat GDP Libya tahun 2010

mengalami tumbuh sekitar 4,2% dari tahun sebelumnya. Situasi berubah saat periode awal konflik perang sipil terjadi tahun 2011 yang berakibat turunnya produksi

minyak menjadi 462 ribu barel per hari. Stabilitas keamanan politik secara otomatis berdampak pada pertumbuhan ekonomi tidak terkecuali di Libya. Perang sipil membuat negara tidak *concern* dalam membangun ekonomi karena instabilitas politik negara yang membuat anggaran negara dialokasikan untuk penanganan konflik dan bantuan bagi rakyat yang terdampak konflik perang sipil.

Kenaikan GDP dari tahun 2011-2012. Kondisi ini tidak lepas dari

pemulihan stabilitas politik Libya yang sudah menentukan pemerintahan transisi di bawah NTC pimpinan Mustafa Abdel Jalil dan dukungan aliansi NATO. Secara statistik ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kondisi ekonomi belum stabil karena proses rekonstruksi negara masih berlangsung di bawah pemerintahan transisi.

Table 4
OPEC Member Countries' real GDP growth rates, 2011-12 (% change over previous period)

	2011	2012
Algeria	2.4	2.6
Angola	3.9	8.1
Ecuador	8.0	4.6
IR Iran	3.0	-1.2
Iraq	8.6	8.5
Kuwait	6.3	5.2
Libya	-62.1	80.0
Nigeria	7.2	6.6
Qatar	14.1	6.2
Saudi Arabia	6.8	6.8
United Arab Emirates	5.2	4.0
Venezuela	4.0	5.6
Average OPEC	2.1	5.3

Sources
IMF: International Financial Statistics; IMF: World Economic Outlook; EIU: country reports; official OPEC Member Countries' statistics; OPEC Secretariat estimates.

Tabel 3.3 Perbandingan GDP Libya Tahun 2011-2012
Sumber: OPEC Annual Report 2012

Meningkatnya GDP sekitar 80% salah satunya karena faktor peningkatan produksi minyak tahun 2012 setelah sebelumnya terjun bebas pada periode awal konflik perang sipil yang terjadi sepanjang tahun 2011. Akan tetapi kondisi

stabilitas keamanan dalam negeri belum sepenuhnya pulih karena proses pemulihan keamanan oleh NTC dan NATO serta perbaikan infrastruktur pendukung masih dalam proses rekonstruksi.

OPEC crude oil production, based on secondary sources, 2009-12 (1,000 b/d)

	2009	2010	2011	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	2012	Average change 12/11
Algeria	1,268	1,250	1,240	1,233	1,214	1,209	1,186	1,210	-29
Angola	1,783	1,786	1,667	1,763	1,743	1,719	1,728	1,738	70
Ecuador	477	475	490	495	496	501	502	499	9
IR Iran	3,725	3,706	3,628	3,391	3,086	2,742	2,680	2,973	-655
Iraq	2,422	2,401	2,665	2,705	2,956	3,135	3,118	2,979	314
Kuwait	2,263	2,297	2,538	2,765	2,788	2,799	2,820	2,793	255
Libya	1,557	1,559	462	1,213	1,424	1,466	1,468	1,393	931
Nigeria	1,812	2,061	2,111	2,075	2,143	2,110	1,965	2,073	-38
Qatar	770	791	794	786	748	745	732	753	-42
Saudi Arabia	8,051	8,263	9,290	9,819	9,905	9,792	9,436	9,737	447
UAE	2,256	2,304	2,516	2,587	2,607	2,653	2,650	2,624	108
Venezuela	2,394	2,338	2,380	2,381	2,367	2,348	2,343	2,360	-20
Total OPEC	28,778	29,231	29,782	31,213	31,478	31,217	30,628	31,132	1,351

ANALISIS KEMUNDURAN KEMUNDURAN KEMUNDURAN
Tahun 2009-2012

Sumber: OPEC Annual Report 2012

Normalisasi produksi minyak mentah adalah upaya nyata Pemerintah NTC meningkatkan lagi penghasilan utama negara Libya dalam upaya pemulihan ekonomi pasca perang sipil di tahun sebelumnya. Fakta di lapangan nyatanya tidak mudah, karena kilang-kilang minyak banyak yang dikuasai oleh oposisi dari faksi-faksi yang berebut kepentingan salah satunya *Libya National Army* (LNA).

Situasi yang terjadi dan keterkaitan dengan minyak di Libya adalah salah satu instrumen yang membuat potensi konflik itu dapat terjadi dengan skala yang fluktuatif tergantung bagaimana kebutuhan faksi-faksi yang bertikai akan konsumsi minyak. Ekonomi minyak dan konflik adalah dua variabel dependen menurut teori *Economic Oil* khususnya yang terjadi di negara *petrostates* atau penghasil minyak seperti umumnya negara-negara di Timur Tengah tidak terkecuali Libya. Ekonomi adalah faktor meningkatnya

frekuensi perang saudara atau hingga skala besar konflik bersenjata dalam negeri.

Minyak sebagai pemantik perang saudara yang dapat dilakukan dengan dalam tiga cara. Pertama, penyediaan keuangan bagi pihak-pihak yang bertikai terutama pemberontak atau separatis. Kedua, meningkatkan nilai finansial tujuan kemenangan dalam perang saudara dengan demikian bangkitnya motivasi untuk berperang. Ketiga, dengan mendorong korupsi dan melemahkan institusi negara. Beberapa tulisan ilmiah yang berkembang memberi bukti bahwa negara pengeksport sumber daya khususnya minyak lebih rentan terjadi perang saudara daripada negara pengeksport non-sumber daya. Contoh negara-negara yang terlibat perang saudara antara lain: Nigeria, Niger, Angola, Sudan, Aljazair, Chad, Irak, Suriah dan Indonesia (Colgan, 2013).

Kekayaan minyak membuat stabilitas ekonomi cenderung di satu sisi

dalam hal ini rezim atau otoritas negara dan instabilitas di sisi lain yang menimbulkan pemberontakan dan kekerasan dari kelompok pemberontak atau anti pemerintah. Secara umum keberhasilan dalam upaya kekerasan atau kudeta terhadap rezim memiliki persentase kecil. Hal tersebut karena pemimpin dari negara penghasil minyak mempunyai kekuatan politik dan ekonomi yang melindungi kekuasaannya. Buktinya para pemimpin di negara penghasil minyak memiliki durasi menjabat yang lebih lama dibanding dengan negara non penghasil minyak.

Minyak membuat negara dan pemimpinnya relatif tidak transparan dalam bidang ekonomi dan politik sehingga memicu ketidakpuasan oposisi dan pemberontak di negara tersebut. Para pemimpin akhirnya menciptakan keputusan tidak populer menciptakan pondasi politiknya untuk mempertahankan kekuasaan. Kondisi seperti itu terjadi di Libya ketika Muammar Qaddafi menggunakan minyak digunakan untuk kebijakan luar negeri agresif kontradiktif dengan kesepakatan internasional yang bermuara pada konflik internasional. Pemimpin cenderung memiliki kekayaan independen karena sumber minyak yang dikelola oleh negara, sehingga dari minyak menciptakan sumber kekuatan politik.

Minyak sebagai instrumen yang digunakan oleh pemimpin untuk membuat kebijakan yang lebih besar daripada rata-rata pemimpin negara *non-petrostate* karena kemampuannya yang lebih besar untuk mendistribusikan kembali pendapatan untuk membeli dukungan politik. Otonomi politik memungkinkan pemimpin untuk mengambil keputusan yang berbeda dari preferensi pendukung domestik. Hal ini membuat pemimpin *petrostates* menghadapi risiko yang lebih kecil untuk diberhentikan dari jabatannya atau dihukum karena pilihan kebijakan luar negeri yang tidak populer. Pendapatan minyak juga dapat menghindari konflik internasional dan menjaga perdamaian dan stabilitas. Negara pengekspor minyak menghadapi insentif ekonomi yang luar biasa kuat untuk mempertahankan hubungan perdagangan yang stabil dengan komunitas internasional. Pada periode singkat ada biaya peluang finansial langsung untuk mengganggu perdagangan minyak.

Sebagai contoh yakni Retorika politik Presiden Venezuela Chavez yang berapi-api terhadap AS untuk tidak melanjutkan ancaman untuk memotong ekspor minyak ke AS. Chavez sadar berharganya ekspor minyak bagi negaranya. Insentif lainnya adalah hilangnya investasi aset di luar negeri yang dibekukan atau disita setelah pecahnya

konflik, seperti ketika AS membekukan aset Iran pada tahun 1980-an selama krisis penyanderaan kedutaan. Sifat ekonomi negara *petrostates* umumnya memiliki aset luar negeri yang cukup besar dalam bentuk dana kekayaan negara. Hal lain yang harus dibayar dalam waktu jangka panjang untuk konflik negara minyak adalah negara-negara konsumen minyak menanggapi volatilitas harga dengan diversifikasi energi seperti nuklir, batu bara dan investasi dalam bahan bakar alternatif.

Situasi pasca jatuhnya Qaddafi di Libya kian kompleks karena peran aktor regional dan internasional. Peredaran senjata di Libya kian meningkat baik senjata yang digunakan oleh pasukan Qaddafi maupun senjata selundupan atau ilegal. Uni Afrika mencatat selama periode tahun 2012-2013 akses masuk senjata ilegal berasal dari perbatasan Mesir dan Sudan jumlahnya mencapai dua puluh juta pcuk dengan nilai jutaan dollar yang mayoritas digunakan oleh tentara LNA pimpinan Jenderal Haftar. Senjata ilegal yang masuk mayoritas buatan AS dan Turki serta Serbia. Embargo senjata yang oleh DK PBB tidak efektif karena masing-masing aktor internasional yang mendukung dua kubu baik GNA dan LNA masih dapat melakukan distribusi senjatanya. GNA konsisten mendapat dukungan senjata dari aliansi NATO seperti AS, Inggris, Jerman, Prancis, Italia

dan Turki. Aliansi NATO mulai pecah seiring peran AS yang mulai mengurangi aktifitas militernya di Libya berkaca pada kegagalannya menuntaskan permasalahan ISIS di Suriah membuat Prancis berubah mendukung Haftar. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan rudal milik Prancis di gudang senjata milik pasukan LNA pimpinan Haftar.

Kontestasi politik di Libya yang rumit seiring dengan pecah aliansi NATO membuat peta kekuatan menjadi terbagi kaena AS tidak lagi ambisius terhadap konflik di Libya. Turki kemudia muncul sebagai aktor internasional yang utama di Libya dengan latar belakang politik identitas dari Ikwaanul Muslimin. Turki mendukung kelompok Ikhwan berbeda dengan aktor lainnya seperti Arab Saudi dan Mesir yang mencoba menghalau Ikhwan karena dianggap sebagai ancaman politik. Rusia sebagai kekuatan penyeimbang dari NATO adalah lawan dari Turki yang masih aktif mendukung Haftar meskipun tidak sepenuhnya karena Turki melihat kekuatan AS yang mulai melemah, hal tersebut menjadi indikasi bahwa Rusia mencoba bermain politik dua kaki bagi kelompok Serraj dan Haftar. Melihat situasi yang demikian, masa depan di Libya diperkirakan bergantung pada faksi-faksi lokal yang didukung oleh sekutunya masing-masing yang memiliki kepentingan berbeda.

Intervensi dan Resolusi Konflik

Konflik di Libya menarik perhatian Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) untuk mendapat peran. Pada tahun 2015 Haftar dibantu Prancis mengusir ISIS dari Benghazi dan AS membantu kelompok pemerintah di Tripoli mengusir ISIS adalah gambaran rumitnya kondisi Libya dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam konflik. Pasukan PBB dan AS yang menduduki pangkalan utama Misrata dan Benghazi berupaya mengusir ISIS di Libya. Pada Desember 2015 Government National Accord (GNA) di bawah pimpinan Perdana Menteri Fayez Al-Serraj dengan dukungan PBB dibentuk untuk menyatukan kelompok milisi di Libya dan membentuk pemerintahan sementara sebelum proses demokrasi pemilihan umum.

GNA dituntut untuk menyatukan para milisi dengan cepat, melenyapkan pengaruh ISIS dengan dukungan AS. Banyaknya aktor politik asing yang bermain di Libya dan sulitnya kelompok lokal untuk bekerja sama membuat Libya tak kunjung menemukan konsensus politik negara. Latar belakang kesukuan yang kuat adalah faktor utama mengapa mereka mengutamakan kepentingan kelompok yang kecil daripada upaya menciptakan negara besar dan bersatu. Banyaknya aktor politik asing yang bermain di Libya dan

sulitnya kelompok lokal untuk bekerja sama membuat Libya tak kunjung menemukan konsensus politik negara. Latar belakang kesukuan yang kuat adalah faktor utama mengapa mereka mengutamakan kepentingan kelompok yang kecil daripada upaya menciptakan negara besar dan bersatu.

Pendekatan resolusi konflik (Pedersen, 2013) adalah sebuah pendekatan interdisiplin dari sudut pandangan permasalahan seperti hubungan internasional, sosial, politik dan ekonomi. Resolusi konflik adalah cara penyelesaian masalah baik dengan cara konstruktif atau destruktif. Pengertian konflik sendiri adalah situasi dua pihak atau lebih memiliki perbedaan nyata atau sasaran. Konflik ini dapat sebagai manifestasi dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Hal ini terjadi karena orang, kelompok orang dan negara mempunyai perbedaan dalam beberapa cara atau lainnya dan kepentingan nyata atau yang dirasakan dalam mencapai tujuan masing-masing. Penyelesaian konflik yang paling efektif dengan menggunakan komunikasi antara kedua belah pihak atau lebih agar mengetahui keinginan dan pikiran pihak-pihak yang berkonflik.

Sebuah konflik selesai lebih cepat ketika aktor non-kekerasan berorientasi pada esensi non-kekerasan dengan melihat posisi kesalahan yang sama tanpa tekanan.

Hal ini dapat terwujud bila masing-masing pihak komitmen untuk tidak membuat situasi masalah terpolarisasi (Ghandi, 2008). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk berdialog dengan saling menghormati satu sama lain. Solusi dengan cara dialog dan negosiasi menggunakan komunikasi butuh konsistensi dan waktu, tetapi bermanfaat untuk jangka panjang dan mereduksi cara-cara kekerasan yang mungkin berdampak jatuhnya korban jiwa dan kerugian negara yang kompleks.

Solusi dengan cara dialog dan negosiasi komunikasi butuh konsistensi dan waktu guna mendapatkan solusi jangka panjang bagi negara serta dapat menghindari adanya korban jiwa yang merugikan stabilitas politik negara. Komitmen dari masing-masing pihak untuk menahan diri yang bertikai penting agar masalah tidak terpolarisasi dan membuka celah bagi pihak-pihak lain untuk memanfaatkan situasi politik yang terjadi. African Union (UA) sebagai mediator konflik pernah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara diplomasi dan negosiasi untuk menciptakan solusi yang komprehensif.

AU sebagai organisasi regional lebih paham kultur sosial dan kondisi anggotanya daripada PBB dan NATO. Intervensi dengan non-kekerasan memberi solusi jangka panjang untuk rakyat dan

melibatkan seluruh kelompok lokal yang berkonflik. Proses negosiasi yang dimediasi AU karena tuduhan negatif dari kelompok oposisi Libya yakni NTC. AU dianggap bukan pihak netral karena mempunyai kedekatan dengan Qaddafi, padahal bila optimalisasi mediasi AU sebagai prioritas mungkin dampak yang terjadi di Libya tidak akan kompleks seperti saat ini karena Qaddafi sudah setuju untuk berhenti menggunakan kekerasan dalam penyelesaian konflik melawan pihak oposisi.

Rakyat saat ini dalam bayangan serupa sebelum perang sipil dan gerakan revolusi tahun 2011 karena aksi intervensi kemanusiaan yang pada aksinya berujung intervensi militer oleh pasukan NATO justru membuat krisis di Libya. Libya dengan kekayaan minyak seharusnya mampu menjadi negara sejahtera untuk rakyatnya justru terjebak dalam krisis pasca konflik perang sipil tahun 2011.

Situasi politik di Libya pasca lengsernya Qaddafi pada masa transisi periode tahun 2011-2015 tak kunjung positif dan kondusif. Faksi-faksi lokal yang berkonflik justru menjadi *proxy* bagi para aktor luar yang sebenarnya bertujuan untuk memperluas pengaruh dan *national interest* negaranya. Aliansi Turki, Qatar dan Sudan yang mendukung Perdana Menteri Fayeze Al Serraj di kelompok GNA beberapa kali berhadapan dengan

kubu Arab Saudi, UEA dan Mesir sebagai pendukung utama LNA pimpinan Jenderal Haftar. Haftar mampu menduduki wilayah-wilayah kilang minyak Libya dibantu Mesir dan UEA. Kedua negar ini mendapat keuntungan harga minyak di pasar gelap yang dilaukan oleh Haftar dan kelompoknya. Politik identitas adalah salah satu faktor masing-masing kubu berlawanan satu sama lain. Persaingan ideologi antara Ikhwanul Muslimin dan Salafi membuat masing-masing negara berada pada posisi politik yang berbeda. aSaudi dan Mesir sepakat berkoalisi menjatuhkan posisi Mursi yang notabene didukung Ikhwanul Muslimin.

Jenderal Haftar dan rezim mendukung Saudi, Mesir dan UEA untuk aksi embargo Qatar yang melindungi kelompok Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Qatar tidak gentar karena mendapat dukungan dari Turki dan Iran yang tidak menganut ideologi Salafi atau sistem kerajaan. Ideologi politik Ikhwanul Muslimin adalah anomali dari Salafi atau ideologi politik negara-negara monarki seperti Saudi, UEA dan Mesir karena Ikhwanul Muslimin selalu menuntut reformasi melawan sistem kerajaan. NATO konsisten berada di posisi pemerintah GNA pimpinan Serraj dengan aksi politik yang berbeda yang secara tujuan sama pada kepentingan sumber daya minyak Libya. Aliansi NATO terdiri

dari negara kuat seperti AS, Prancis, Inggris, Italia, Jerman dan Turki adalah negara-negara yang punya kebutuhan ekspor minyak dari Libya. Peran AS terhadap NATO untuk ambil keputusan dominan pada persoalan di Libya. AS berkomitmen dalam upaya rekonstruksi Libya pasca perang sipil dan bantuan kemanusiaan di Libya meskipun belum signifikan karena kondisi Libya yang rumit. Rusia dan Tiongkok adalah negara di luar NATO yang melihat situasi di Libya untuk kepentingan negara mereka.

Politik Revolusioner Qaddafi

Sebuah negara yang melakukan revolusi umumnya memiliki pemimpin yang revolusioner dengan preferensi untuk agresi demi menciptakan pragmatisme negara dan tujuan politik dari pemimpinnya. Revolusi dilakukan membutuhkan kekuatan antara lain kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Hal tersebut dapat terwujud bila suatu negara mempunyai sumber ekonomi yang memadai dan masif sebagai sumber kekuatan. Faktor ekonomi dan revolusi adalah dua variabel utama dalam proses revolusi yang nantinya berpengaruh terhadap kebijakan hubungan internasional suatu negara (Colgan, 2013). Pemimpin yang berperilaku revolusioner adalah pemimpin yang membuat perubahan dalam beberapa hal seperti politik, sosial dan ekonomi dari status quo negara. Pemimpin

revolusioner biasanya mempunyai sikap terbuka terhadap resiko konflik, artinya negara yang dipimpinnya siap terlibat dalam isu atau konflik internasional.

Pemimpin revolusioner tidak takut dalam mengambil tindakan yang beresiko cedera dan kematian untuk mewujudkan ambisinya. Dengan resiko dan keberanian tersebut, biasanya pemimpin revolusioner tidak segan berkonfrontasi dalam urusan hubungan internasional. Ada dua faktor dependen dari sikap pemimpin revolusioner, pertama situasi internasional yang mempengaruhi kondisi domestik negaranya atau yang kedua dalam kebijakan domestik pemimpin revolusioner akan dilanjutkan dalam tujuannya dalam agresi politik internasional.

Pemikiran politik Qaddafi yang revolusioner membuat bara api tidak kunjung padam. Libya selalu terlibat dalam konfrontasi dan isu politik negara lain. Politik Qaddafi yang radikal dalam bidang politik, sosial dan ekonomi Libya. Qaddafi dengan ide *Pan Arabisme* dan Unifikasi Afrika awalnya mendapat simpati dan dukungan rakyat dan negara-negara tetangga, pada dua dekade awal menjabat dirinya sangat anti liberalisme Barat. Qaddafi tidak ragu terlibat dalam isu internasional dan menggunakan kekuatan militer. Libya terlibat dalam konflik di Chad, Niger dan Mesir.

Pemimpin revolusioner mempunyai sikap yang terbuka terhadap resiko konflik dan siap mengambil resiko atas pemikiran politiknya yang revolusioner.

Revolusi pada umumnya dilakukan dengan kekerasan dan kekuatan bersenjata seperti yang dilakukan Qaddafi. Pandangan revolusi politiknya dalam mewujudkan Persatuan Arab dilakukan dengan memberi pengaruh kuat pada negara-negara tetangga dan isu internasional. Qaddafi nyata mendukung kelompok separatis di Chad pada tahun 1970-an dengan harapan Chad bersedia mendukung terbentuknya Kerajaan Islam Libya-Chad.

Qaddafi juga memberi pelatihan bagi Partai Pembebasan Palestina (PLO) adalah beberapa contoh ambisi politik Qaddafi dengan pemikiran revolusionernya yang menjadi ancaman bagi perdamaian internasional. Revolusi menurut Colgan (2013) dipimpin oleh pemimpin revolusioner dengan preferensi untuk melakukan agresi berbekal kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Qaddafi menggunakan lebih dari 25% pendapatan negara untuk memperkuat sektor militer sebagai senjata politik revolusioner Qaddafi dalam mempertahankan kekuasaan dan mewujudkan ambisi politiknya.

Pendapatan minyak yang kuat digunakan untuk kebijakan luar negeri

agresif yang tidak jarang berbeda dengan kesepakatan internasional yang bermuara pada konflik internasional. Pemimpin cenderung memiliki kekayaan independen karena sumber minyak yang dikelola oleh negara, sehingga dari minyak menciptakan sumber kekuatan politik. Qaddafi menggunakan kekuatan ekonomi minyak dengan penguatan pada sektor militer dan bantuan pada negara lain untuk mewujudkan revolusi politiknya, selain itu kekayaan minyak juga dimanfaatkan untuk bagi hasil dengan keluarga dan orang-orang di pemerintahan.

Qaddafi berupaya menciptakan kebangkitan politik identitas Libya dengan latar belakang agama yakni mayoritas Muslim dan suku Arab yang selaras. Pada tanggal 11 Desember 1969 dilaksanakan Proklamasi konstitusional Dewan Komando Revolusi tentang menyerukan kebebasan, sosialisme, persatuan, identitas Arab dan Afrika, dengan Islam sebagai agama negara. Qaddafi adalah pemuja nasionalisme Arab, sejarah masa lalu dengan ideologi yang sama adalah potensi ideologi Qaddafi bangkitkan kejayaan dunia Arab. Negara-negara Arab di berada satu komando cita-cita untuk mereduksi ketergantungan pemerintah yang didukung Barat dan imperialisme Barat di tanah Arab.

Qaddafi melakukan konsolidasi kekuasaan dengan membuat sistem

terintegrasi dari aspek ideologi, pemerintahan, dan aparat negara untuk mengatur negara. Haluan politik Qaddafi dalam Buku Hijau (*The Green Book*) yang seharusnya menjadi tulang punggung ideologi politik untuk pemerintahan Gaddafi. Buku Hijau dan Jamahiriyya Arab ideologi *key point* bahwa ada beberapa tingkat Kongres dan Komite Rakyat dengan tujuan rakyat memiliki bertanggung jawab atas negara sumber daya dan administrasi, tanpa hierarki, mengelola urusan mereka sendiri, menciptakan sosialis negara. Buku Hijau pada nyatanya hanya menjadi retorika semu, karena rezim penguasa di bawah komando Qaddafi sebagai penentu keputusan. Ideologi yang dipaksakan pada rakyat, kebebasan di ikat dan aspirasi dibatasi secara maksimal. Budaya politik di Libya yang patriarki dan tribalisme mendukung ideologi politik Qaddafi dengan cita-cita persatuan Arab yang demokrasi dan melibatkan rakyat, walaupun pada nyatanya selama kepemimpinannya jauh dari nilai positif.

Qaddafi perlu dukungan politik dari pemerintahan agar mudah mewujudkan cita-cita politiknya, oleh karena itu militer sebagai alat negara yang fundamental harus satu frekuensi dalam mengawal pemerintahan. Militer digunakan untuk mencegah perlawanan terhadap rezim dan memperkuat ideologi negara. Rakyat atau

faksi oposisi yang terbuka menentang rezim akan ditindak represif dengan dipenjara atau dibunuh. Anggota oposisi harus pindah ke luar negeri, di mana pun mereka berada diburu oleh Qaddafi dan pemerintahnya. Intimidasi membuat rakyat takut akibat yang diterima dikemudian hari. Hubungan politik internasional dan ketidakpercayaan Qadhafi terhadap norma-norma internasional, termasuk norma-norma yang mengatur kedaulatan dan kenegaraan, berkontribusi tidak hanya pada tekanan komunitas internasional, tetapi juga pada upayanya untuk secara sengaja merusak lembaga-lembaga negara demi jaringan patronase di mana tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh dikooptasi dan ikatan kesukuan dipadatkan. Qaddafi dan pemerintahannya melewati beberapa sanksi dunia internasional dan embargo baik politik dan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas bahwa ada keterkaitan dan keterkaitan bagaimana peran dan kepentingan NATO dalam konflik perang sipil di Libya. Pertama, mempunyai hubungan dengan sumber kekayaan minyak Libya yang menempati posisi ketiga terbesar di Afrika dan nomor tujuh di dunia. Produksi minyak Libya ada pada posisi nomor tujuh belas dunia dengan puncak produksi mencapai 3 juta barel pada periode 2000-an. Pada sektor

ekonomi Libya di bawah Qaddafi berubah pesat menjadi negara yang kaya dan mampu memberikan subsidi pendidikan, tempat tinggal dan kebutuhan pokok untuk rakyat dengan pengelolaan sumber daya minyak yang diatur negara. Nasionalisasi perusahaan minyak membuat Libya menguasai 51% saham mayoritas dan menjadi satu-satunya di dunia.

Kondisi ini membuat sikap Qaddafi *unfriendly* bagi negara-negara aliansi NATO yang punya kepentingan minyak di Libya. Pajak dan biaya produksi yang mahal memberatkan bagi perusahaan-perusahaan minyak internasional yang bermitra di Libya. Sempat di embargo AS dan Uni Eropa pada tahun 1990-an tidak membuat Libya bergeming.

Kedua, sikap politik revolusioner Qaddafi yang ingin mempersatukan negara-negara Arab dengan semangat *Pan Arabisme* dan pemikiran konserfatif yang anti dunia Barat menjadikan dirinya musuh bersama dunia internasional khususnya aliansi negara NATO. Libya berani berkonfrontasi dalam konflik regional dan internasional menggunakan kekuatan militer. Pada perang Mesir-Israel, Libya memberi pinjaman sekitar 30 jet tempur dan awaknya untuk Mesir. Kedua, Libya terlibat dalam proksi perang sipil di Chad dan menjadikan kelompok oposisi pimpinan Goukouni Oueddei melawan

rezim presiden Tombalbaye pada periode tahun 1973-1976.

Libya melakukan invasi di jalur Auozou perbatasan Libya-Chad yang kaya sumber mineral dan uranium. Tahun 1976 Libya melanjutkan invasi membantu Goukouni di Chad bagian tengah dengan mendukung tentara bagian darat Chad dan berhasil, pada tahun 1979-1980 Goukouni menjadi presiden Chad. Motivasi Qaddafi bukan tanpa alasan, Libya ingin menyatukan Chad dengan Libya sebagai langkah misioner Qaddafi membuat Kerajaan Islam Libya-Chad namun mendapat penolakan dari sekutu Goukouni.

Penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah hanya akan merugikan rakyat, menderita dan mengungsi dari tempat tinggal yang damai. Anak-anak menjadi korban masa depannya hilang karena trauma luka psikologis akibat dampak perang. Ekonomi negara hancur karena perang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan makmur dan sejahtera. Negosiasi dan komunikasi yang komprehensif akan memberi manfaat dalam penyelesaian masalah yang rumit dan kompleks daripada upaya kekerasan yang justru melahirkan permasalahan baru. Negara menjadi terpecah dan kelompok kecil berusaha mempertahankan hidup

menggunakan cara-cara yang radikal untuk kelanjutan hidup kelompoknya.

Solusi konflik pasca perang sipil di Libya dengan cara dialog dan negosiasi komunikasi butuh konsistensi serta waktu guna mendapatkan solusi jangka panjang bagi negara Libya. Menghindari adanya korban jiwa yang merugikan stabilitas politik negara. Komitmen dari masing-masing pihak untuk menahan diri yang bertikai penting agar masalah tidak terpolarisasi dan membuka celah bagi pihak-pihak lain untuk memanfaatkan situasi politik yang terjadi. *African Union* (AU) sebagai mediator konflik pernah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara diplomasi dan negosiasi untuk menciptakan solusi yang komprehensif.

AU sebagai organisasi regional lebih paham kultur sosial dan kondisi anggotanya daripada PBB dan NATO. Intervensi dengan non-kekerasan memberi solusi jangka panjang untuk rakyat dan melibatkan seluruh kelompok lokal yang berkonflik. Proses negosiasi dengan upaya damai sebagai prioritas menghindari dampak negatif yang terjadi di Libya tidak akan kompleks seperti saat ini yang mana menggunakan kekerasan dalam penyelesaian konflik melawan pihak oposisi. Negosiasi dan mediai juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Libya dan mereduksi peran aktor asing

agar tidak kembali terjadi kepentingan negara yang sama saat tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. (2017). They defeated us all: International interest, local politics, and contested sovereignty in Libya. *Middle East Journal*, 71, 229-247.
- Bagaskara. (2019). Draft resolusi konflik penyelesaian konflik perang sipil di Libya. *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Islam*, 3, 1-25.
- Biggar, N. (2015). In defence of war. *New Blackfriars*, 96 (1062), 192-205.
- Colgan, J. D. (2013). *Petro Aggression: When Oil Causes War*. New York: Cambridge University Press.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Engdahl, F. W. (2011). *A century of war: Anglo-American oil politics and the new world order*. Wiesbaden: Edition Engdahl.
- Estelle, E. (2017). A strategy for success in Libya. *American Enterprise Institute*, 14-24.
- Hanifa, A. N., Dwiwarno, N., & Setiyono, J. (2019). Legalitas intervensi militer NATO dalam penyelesaian konflik internal di Libya dalam perspektif hukum internasional. *Diponegoro Law Journal*, 8, 862-876.
- Napang, Marthen; Rohmann, Syaiful; and Nurhasanah, Siti (2020) "Nato And Russian Political Policy On Eastern Europe," *Journal of Strategic and Global Studies*: Vol. 3 : No. 2 , Article 3. DOI: 10.7454/jsgs.v3i2.1032
- Indrawan, J. (2017). Intervensi kemanusiaan dan jatuhnya kuasa Kolonel Muammar Gaddafi di Libya. *Jurnal Ekonomi, Kultur dan Perubahan Sosial*, 6, 30-48.
- Indrawan, J. (2018). Intervensi kemanusiaan ke Libya: Refleksi politik. *Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 8, 10-18.
- Indrawan, J. (2013). Legalitas dan motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4, 127-149.
- Kesya, M. (2020). *Analisis failed states terhadap Libya pasca kepemimpinan Muammar Qaddafi (2012-2016)*. Skripsi sarjana, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Jakarta.
- Krisetya, B. A. (2016). Assessing the responsibility to rebuild component in post-Gaddafi Libya. *Journal of International Relations*, 2, 47-56.
- Machmudi, Y. (2021). *Timur tengah dalam sorotan: Dinamika timur*

- tengah dalam perspektif Indonesia.*
- Mantasari, Machmudi (2020). Strategi *devide et impera* oleh Amerika Serikat dalam konflik di Suriah (2011-2018). *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 7, 18-38.
- Pedersen, K. M. (2013). *After Gaddafi, what now? issues of transitional justice*. Master of Arts, Faculty of The Graduate Scl of Arts and Sciences, Washington DC.
- Phillips, D., & Schweisfurth, M. (2014). *Comparative and international education: An introduction to theory, method, and practice*. A & C Black.
- Prajaya, M. P. (2012). Keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam penyelesaian konflik non-internasional di Libya ketika penggulingan presiden Muammar Kaddafi. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* .
- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Rahmawati, M. (2012). *Pemikiran Muammar Qaddafi dalam "The Green Book": Penerapannya pada 1969-1977*. Skripsi sarjana, Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok.
- Jakarta: Bumi Aksar.
- Rohman, Syaiful, Marthen Napang, Siti Nurhasanah (2021), *Russia-NATO Strategic Rivalry and Influence Struggle in Eastern Europe in Security and Economy*, Politicon : Jurnal Ilmu Politik, Vol 3, No 1 (2021). DOI :10.15575/politicon.v3i1.9678
- Stepan, A., & Linz, J. J. (2013). Democratization theory and the "Arab spring". *Journal of Democracy*, 24 (2), 15-30.
- Swastika, M. B. (2019). Intervensi kemanusiaan NATO di Libya: Analisis Jus In Bello. *Review of International Relations*, 1, 57-71.
- Taufiq, F. (2018). Arah kebijakan luar negeri Rusia terhadap kontestasi Iran dan Arab Saudi. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5, 84-97.
- Tint, B. (Ed.). (2017). *Diasporas in dialogue: Conflict transformation and reconciliation in worldwide refugee communities*. John Wiley & Sons.
- Vandewalle, D. (2012). *A History of Modern Libya (2nd ed.)*. New York, United States of America: Cambrigde University Press.
- Wardhana, D. H., Farhan, M., Bulgini, M. I., & Niswah, F. M. (2018). Kajian interdisiplin: Transisi demokrasi di Libya pasca perang sipil 2011.

- Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5, 247-263.
- Widyarsa, M. R. (2014). Rezim Militer dan Otoriter di Mesir, Suriah dan Libya. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1, 273-283.
- Yasmine, S. E. (2015). Arab spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi di Timur Tengah. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 28, 106-113.